



PENGARUH LINGKUNGAN PENGENDALIAN TERHADAP FRAUD PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

*The Effect Of Environmental Control On Fraud In The Governmental Financial
Statements Of The Parepare City*

Jumriani¹⁾, Anwar²⁾

E-mail: jumrianisemsi@gmail.com¹⁾, parepareanwar@yahoo.co.id²⁾
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstrack

The Government Internal Control System (GICS), which is considered weak and inappropriate, can commit fraud. The author takes the title "The Effect of Control Environment on Fraud in the Report on Local Government Finances of Parepare City". This research was conducted with the aim of finding out whether or not the influence of the control environment on organizational structure and human resource policy variables on fraud in the Report on Local Government Finances of Parepare City. The purpose of this study is expected to provide insight, knowledge about the detection of indications of fraud in the report on local government finances and provide evidence of control environment influences in the government internal controls that can provide opportunities for financial statement fraud. The research method used is quantitative descriptive method. To obtain the results of this study, researchers conducted data collection at the Regional Secretariat of Parepare City by distributing one questionnaire to each employee, then the data obtained were processed using the SPSS For Windows Version 21 application with data processing techniques, namely multiple linear regression. The results of this study indicate that the control environment in the organizational structure policy has a positive effect on efforts to detect indications of fraud in the Human Resources Agency (HRA) of Parepare City. The influence of the control environment in human resource policies has a significant influence on efforts to detect indications of fraud.

Keywords: Control Environment, Fraud, Report on Local Government Finances

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dianggap lemah dan tidak tepat dapat melakukan kecurangan. Penulis mengambil judul "Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Indikasi *Fraud* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare". Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh lingkungan pengendalian pada variabel struktur organisasi dan kebijakan sumber daya manusia terhadap *fraud* pada laporan keuangan daerah Kota Parepare. Adapun tujuan penelitian ini diharapkan memberikan wawasan, pengetahuan mengenai deteksi indikasi *fraud* di dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan bukti adanya pengaruh lingkungan pengelolaan pengendalian internal pemerintah yang dapat memberikan peluang terhadap kecurangan laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Untuk memperoleh hasil dari penelitian ini maka peneliti melakukan pengambilan data di Sekretariat Daerah kota Parepare dengan membagikan satu kuesioner masing-masing pegawai, kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan aplikasi SPSS For Windows Version 21 dengan teknik pengolahan data yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian dalam kebijakan struktur organisasi berpengaruh positif terhadap usaha deteksi adanya indikasi *fraud* di kantor BKD Kota Parepare, pengaruh lingkungan pengendalian dalam kebijakan sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap usaha deteksi adanya indikasi *fraud*.

Kata Kunci: Lingkungan Pengendalian, Fraud, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. (Ihyaul Ulum, 2009)

Akuntabilitas kinerja instansi-instansi di Indonesia saat ini dinilai rendah dibuktikan dengan maraknya praktik fraud yang tercermin pada banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh KPKorupsi rentan dilakukan pada sektor pelayanan publik. Hal itu dinyatakan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) setelah melakukan pemantauan penanganan kasus korupsi tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengidentifikasi lingkungan pengendalian pemerintah diwujudkan melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen dan gaya operasional serta kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang penugasan dan tanggung jawab yang tepat, penerapan kebijakan sumber daya manusia yang sehat, perwujudan peran aparat pengawasan intern, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (S.P. Hariningsih, 2006:129)

Penelitian ini berlokasi di kota Parepare karena pertimbangan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2013 dan 2014 Pemerintah Kota Parepare ingin agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) walaupun sistem akuntansi pemerintah (SAP) berubah menjadi berbasis akrual. Perubahan standar akuntansi pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Menurut Walikota Parepare dalam hal ini Pemerintah Kota Parepare ingin opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan cara penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dengan penciptaan lingkungan pengendalian yang kondusif. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap *Fraud* Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare". Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dimaksudkan agar mendapat beberapa bukti, antara lain: 1) Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh lingkungan pengendalian dalam struktur organisasi terhadap deteksi adanya *fraud* pada laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Menjelaskan pengaruh lingkungan pengendalian dalam kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya terhadap deteksi adanya *fraud* pada laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih lokasi Seluruh Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah Kota Parepare dengan waktu penelitian selama 5 (lima) bulan mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2019.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada BKD dalam lingkup pemerintah Kota Parepare. Sampel dalam penelitian ini seluruh pegawai yang ada di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Semua bagian dalam populasi dapat dijadikan sebagai sampel yaitu 94 Responden.

Definisi Operasional

- a. Lingkungan Pengendaliannya itu Arahan bagi organisasi untuk mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang berada dalam organisasi.
- b. Fraud yaitu setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
- b. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada objek penelitian di pemerintah daerah Kota Parepare.
- c. Studi Pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

- a. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pernyataan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu.

- a. Teknik Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel terikat (*dependent*).

Tujuan dari metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Rumus Regresi linier Berganda:

$$Y = a + bX_1 + X_2$$

Dimana:	Y	= Fraud Laporan Keuangan Pemerintah
	X ₁	= Lingkungan Pengendalian (Struktur Organisasi)
	X ₂	= Lingkungan Pengendalian (SDM)
	a	= Bilangan Konstanta
	b	= Koefisien Regresi

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Analisis data dilakukan untuk pengujian hipotesis penelitian yakni untuk Pengaruh Lingkungan Pengendalian yang diprosikan oleh struktur organisasi dan kebijakan sumber daya manusia mempengaruhi indikasi *fraud* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare sekaligus untuk memperkuat gambaran dari analisis deskriptif kuantitatif melalui:

- a. Analisis Regresi Linear Berganda.

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji variabel independen (struktur organisasi dan sumber daya Manusia) terhadap variabel dependen (deteksi adanya indikasi *fraud*) dengan melihat kekuatan hubungan. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian :

- 1) Koefisien Determinan (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

Tabel 1
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.596 ^a	.355	.340	2.54435

Sumber: Output SPSS 24

Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,340. Hal ini berarti 34.0% variabel deteksi adanya indikasi *fraud* dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu struktur organisasi, dan sumber daya manusia, Sedangkan sisanya (100% - 34.0% = 66%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

2) Uji Kelayakan (UjiF)

Pada pengujian kelayakan atau uji F dalam penelitian ini menggunakan pengujian Anova. Hasil dari pengujian kelayakan ini dapat dilihat dari tabel 2

Tabel 2
Hasil Uji F- Uji Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323.741	2	161.871	25.004	.000 ^a
	Residual	589.110	91	6.474		
	Total	912.851	93			

Sumber: Output SPSS 24

Hasil Uji statistik F pada tabel 2 untuk menguji struktur organisasi sumber daya manusia dan *fraud*, F-hitung sebesar 25.004 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar 25.004 > F-tabel sebesar 6.944 maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur organisasi dan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap deteksi adanya indikasi *fraud*.

3) Uji Signifikansi (Ujit)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila arah koefisien sesuai dengan bunyi hipotesis dan nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, dan jika salah satu keduanya tidak terpenuhi maka hipotesis ditolak atau tidak didukung. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti pada tabel 3.

Tabel 3
Uji Signifikansi (Ujit) Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.409	1.700		3.182	.002
	SO	.258	.078	.316	3.294	.001
	SDM	.302	.077	.376	3.917	.000

Sumber: Output SPSS 24

Tabel 3 di atas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 5.409 + -0.258X_1 + 0.302X_2 + e$$

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Pengaruh lingkungan pengendalian dalam struktur organisasi mempengaruhi usaha deteksi adanya indikasi *fraud*

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel struktur organisasi memiliki t hitung sebesar 3.294 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $94 - 2 = 92$ sebesar 2.776 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap usaha deteksi adanya indikasi *fraud* di kantor BKD Kota Parepare.

- b) Pengaruh lingkungan pengendalian dalam kebijakan sumber daya manusia Terhadap usaha deteksi adanya indikasi *fraud*

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel sumber daya manusia memiliki t hitung sebesar 3.917 lebih besar dari t tabel sebesar 2.776. dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya berpengaruh signifikan. Hal ini berarti pengaruh lingkungan pengendalian dalam kebijakan sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap usaha deteksi adanya indikasi *fraud* di kantor BKD Kota Parepare.

Pembahasan

1. Pengaruh lingkungan pengendalian dalam struktur organisasi mempengaruhi usaha deteksi adanya indikasi *fraud*

Terjadinya sebuah fraud dalam sebuah profesi, misalnya akuntansi juga tidak luput dari kecurangan. Akuntan yang berbuat curang dalam prosedur akuntansi menyebabkan informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat digunakan oleh pihak yang menggunakannya. Informasi akuntansi sebuah entiti sangatlah penting karena informasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan organisasi. Penyebab terjadinya sebuah dorongan adanya sebuah kecurangan dalam sebuah organisasi disebabkan tidak terpenuhinya kesetaraan dalam tempat bekerja. Menurut Arens (2008:432) penyebab terjadinya kecurangan disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yaitu, tekanan /insentif, kesempatan merupakan situasi yang membuka kesempatan pegawai untuk melakukan kecurangan, dan sikap merupakan karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pegawai untuk melakukan kecurangan.

2. Pengaruh lingkungan pengendalian dalam kebijakan sumber daya manusia Terhadap usaha deteksi adanya indikasi *fraud*,

Sumber daya manusia dalam hal mendeteksi adanya indikasi *fraud* sangat berpengaruh karena dalam hal kecurangan yang ada dalam sebuah organisasi harus dipahami oleh pegawai, terjadinya sebuah kecurangan di sebabkan karena faktor kebutuhan (*need*), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja

Sumber daya manusia diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendeteksi adanya indikasi *fraud* dalam organisasi, pengetahuan yang harus dimiliki *Sumber daya manusia*, menurut Rahmawati (2014) menjelaskan bahwa pengalaman adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini tentunya akan membantu auditor dalam mendeteksi fraud tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor BKD Kota Parepare, menyatakan bahwa pegawai memiliki peran dalam mendeteksi fraud yang telah terjadi secepat mungkin, sebelum terjadi dampak yang buruk dalam sebuah organisasi. Pengecekan tersebut dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan *internal auditing*. Dalam melakukan auditing, auditor internal dapat memfokuskan diri pada area-area yang memiliki risiko tinggi terjadinya fraud seperti transaksi kas, rekonsiliasi bank, proses pengadaan, penjualan, dll.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap *Fraud* Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dari hasil analisis dapat dilihat bahwa variabel struktur organisasi memiliki t hitung sebesar 3.294 > sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan t hitung sebesar 2.776 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap usaha deteksi adanya indikasi *fraud* di kantor BKD Kota Parepare. Hal ini dapat dimaknai bahwa baik buruknya pemahaman pegawai dalam sebuah organisasi berpengaruh terhadap indikasi adanya *fraud* dalam sebuah instansi atau organisasi.
- b. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa variabel sumber daya manusia memiliki t hitung sebesar 3.917 lebih besar dari t tabel sebesar 2.776. dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya berpengaruh signifikan. Hal ini berarti pengaruh lingkungan pengendalian dalam kebijakan sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap usaha deteksi adanya indikasi *fraud* di kantor BKD Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, 2012, "*Pengelolaan Keuangan Daerah*", Edisi Ketiga Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Amiruddin Idris, 2013, "*Pengaruh Ketersediaan Anggaran Dan Jiwa Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pelayanan Aparatus SKPD Di Kabupaten Aceh Utara*". jurnal.ptkb-aceh.ac.id. Akses tanggal 9 Januari 2016.
- Andri Syam Putra dan Dadang Mashur, 2013, "*Manajemen Anggaran Kas Daerah*". *ejournal.unri.ac.id*. Akses tanggal 16 Januari 2016. Horacio Fernandes Ribeiro, Sumartono, dan Ratih Nurpratiwi, 2015, "*Manajemen Anggaran Pemerintah Berbasis Kinerja Di Dinas Kesehatan Distrik Dili-Timor Leste*". *publikasi.unitri.ac.id*. Akses tanggal 16 Januari 2016.
- Arens, Alvin A, 2008, *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*, Jilid I, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Hariningsih S.P. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Ardana Media
- Mahmudi, 2010, "*Manajemen Keuangan Daerah*", Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, 2013, "*Manajemen Kinerja Sektor Publik*", Edisi Kedua Cetakan Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- MC Diskominfo, 2012, "*Sejarah Kota Parepare*", Diakses Tanggal 28 Mei 2017, dari <http://pareparekota.go.id/kominfo/profil-kota/sejarah-kota-parepare>.
- Ninuk Sri Winarni, 2013, "*Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Pemerintah Kota Tarakan*", Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Tesis, Yogyakarta.
- Nurlan Darise, 2008, "*Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*", Indeks, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018 <https://kamoenyo.wordpress.com/2007/06/27/penjelasan-peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018 https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26931/node/911/pp-no-39-tahun-2007-pengelolaan-uang-negara_daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar AKuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Parepare Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kota.

Rolly Indra dan Helmy Adam, 2013, "Evaluasi Implementasi Manajemen Kas Pemerintah Pusat (Studi Kasus pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan)". jimfeb.ub.ac.id. Akses tanggal 9 Januari 2016.

Santoso, Purbayu Budi, Ashari, 2005, "Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS", Andi, Yogyakarta.

Sugiyono, 2014, "Metode Penelitian Manajemen", Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2010, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", Cetakan Keempat belas, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018 www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018 www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-1-tahun-2004-tentang-perbendaharaan-negara/UU-67-59-uu01_2004.htm

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018 luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU15-2004PemeriksaanKeuangan.pdf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018 https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2014

V. WiratnaSujarweni, 2015, "Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis", Pustaka Baru, Yogyakarta.

Wawancara Pribadi dengan Noldy YR. Parepare, tanggal 1 Maret 2016.

www.bpkp.go.id .www.bpkp.go.id .www.bpkp.go.id

Wikipedia, "Anggaran Sektor Publik", Diakses Tanggal 05 Januari 2018, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik.

Yuneita Anisma dan Elian Susanti, 2010, "Evaluasi Manajemen Pengelolaan Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir". ejournal.unri.ac.id. Akses tanggal 9 Januari 2016.